BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 232 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CILENGKRANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cilengkrang untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cilengkrang untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Cilengkrang serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Cilengkrang adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cilengkrang untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Cilengkrang untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Cilengkrang.
(2) Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Cilengkrang tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cilengkrang;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Cilengkrang dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Cilengkrang;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Cilengkrang yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Cilengkrang digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Cilengkrang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA KECAMATAN CILENGKRANG

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Cilengkrang tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Cilengkrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN CILENGKRANG

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Cilengkrang meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Cilengkrang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cilengkrang;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Cilengkrang dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Cilengkrang.

Pasal 7

(1) Kecamatan Cilengkrang membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Cilengkrang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Cilengkrang tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Kecamatan Cilengkrang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Cilengkrang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Cilengkrang terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Kecamatan Cilengkrang.

(3) Camat Kecamatan Cilengkrang menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Cilengkrang.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang dilakukan pada saat penyusunan RKA.

BAB V
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN CILENGKRANG

Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Cilengkrang dapat diubah apabila:
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD;
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cilengkrang beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Cilengkrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari:
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Cilengkrang tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 232

Pemerintah
Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG

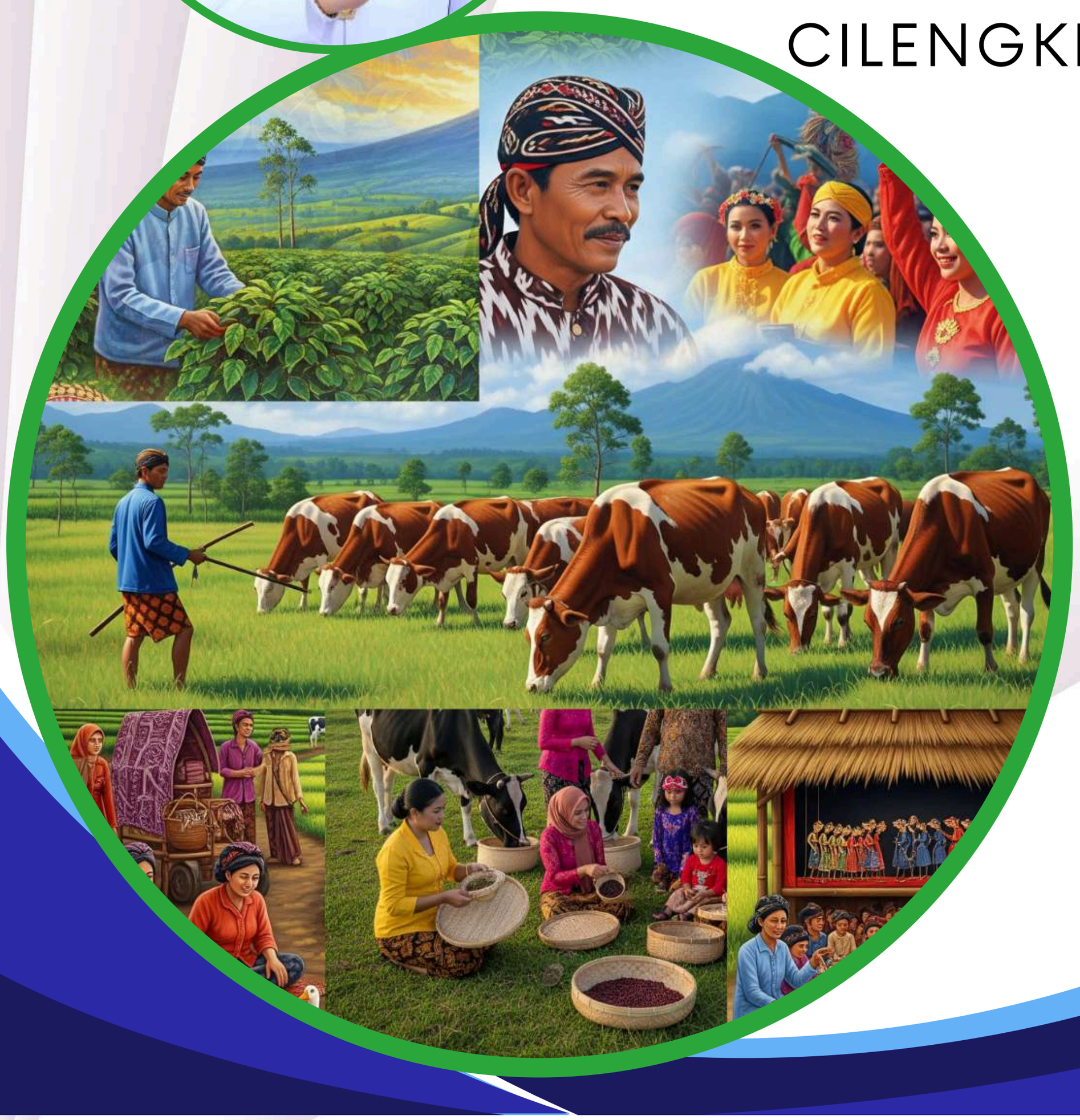
PERATURAN



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

TAHUN 2026

KECAMATAN CILENGKRANG



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rancangan perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Cilengkrang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Kecamatan Cilengkrang Tahun 2024 dan 2025.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Kecamatan Cilengkrang sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Cilengkrang, 14 Juli 2025
CAMAT CILENGKRANG

Drs AGUS RIZAL, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680812 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistimatika Penyusunan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH . 50
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional 50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 59
3.3. Program dan Kegiatan 78

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 89

BAB V PENUTUP 100
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 100
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 100
5.3. Rencana Tindak Lanjut 101

Lampiran-lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang ini mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode Tahun 2024 serta Tahun berjalan 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintahan, serta berperan penting dalam setiap kinerja suatu Perangkat Daerah dalam memaksimalkan program dan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

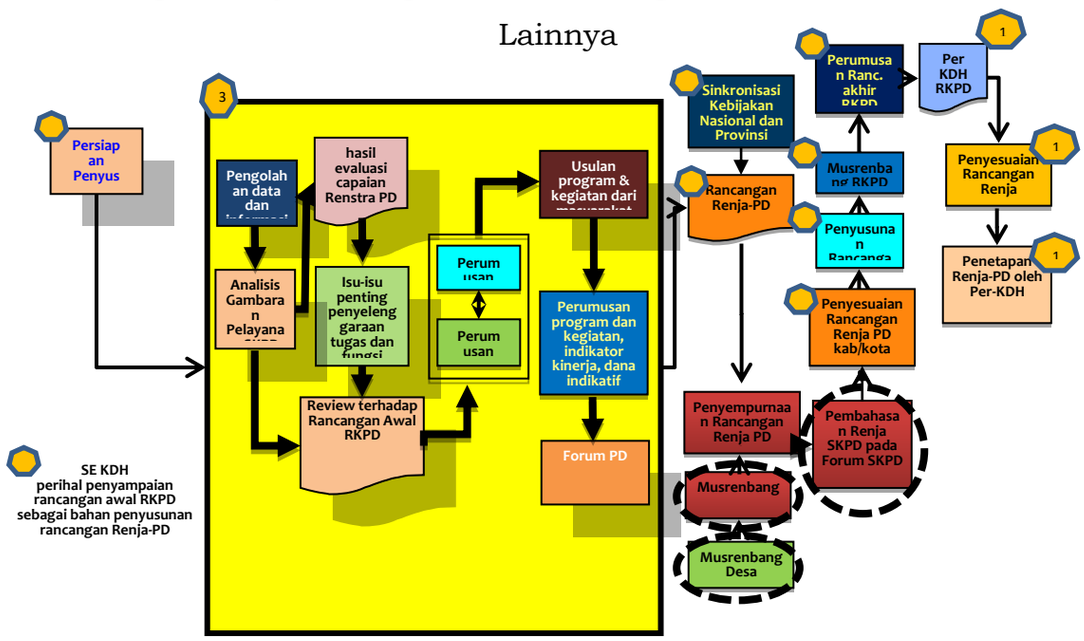
RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026, sesuai dengan rencana program prioritas pembangunan daerah Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 merupakan tahun ke- lima periode Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021 – 2026, dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenBelanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan Rancangan Awal
c. Penyusunan Rancangan
d. Penyusunan Rancangan Akhir

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2022 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

d. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);

q. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

r. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

b. Tujuan :

   a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026;
   b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024 dan 2025 ;
   c. Sebagai pedoman perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2026 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakanag

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang, dan keterkaitan antara antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Cilengkrang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Cilengkrang

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Cilengkrang, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat informasi tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalann yang seharusnya pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilengkrang

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cilengkrang.

Berisikan uraian mengenai :

1. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program;
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan menganai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini di kemukakan rumusan rencana kerja beserta rancangan pendanaan Kecamatan Cilengkrang.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja tahun lalu dan tahun berjalan merupakan basis data untuk merencanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah selanjutnya. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
     1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
     2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Kecamatan;
     3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Kecamatan;
     4) Koordinasi dan Penyusunan DPA- Kecamatan;
     5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-Kecamatan;
     6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan; dan
     7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
     8) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
     9) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
   - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
     1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
     2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Kecamatan;

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan;
4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Kecamatan

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan;

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3) Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
3) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
5) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
6) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
7) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

8) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
9) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
10) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
11) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga;
12) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
      2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional;
      3) Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal; dan
      4) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian terhadap Rencana Strategis Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung

Nama PD : Kecamatan Cilengkrang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**	80 poin	**76.08 point**	**77 point**	**79.80 Point**	102.60%	**80.00 Point**	-	**79.80 Point**	**99.75%**
		Persentase BMD Dalam Keadaan Baik	88 %	**85.00**	**86.00**	**84.89**	98.71%	**87.00 %**	-	**84.89**	**96.47%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu**	100%	**40%**	**100%**	**100%**	100.00%	**100.00 %**	-	**45.00%**	**45.00%**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	6 dokumen	54.55%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	-	3 dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4 dokumen	80.00%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3 dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	-	3 dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Laporan	-	3 dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Laporan	1.00 Laporan	3 dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0.00%	1.00 Dokumen	-	0 dokumen	0.00%

7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0.00%	1.00 Data	1.00 Data	0 dokumen	0.00%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Keuangan yang Tepat Waktu**	100 %	**40%**	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00 %**	**-**	**45%**	**45.00%**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1440 orang/bulan	576 orang / bulan	288 orang/ bulan	279 orang/ bulan	100.00%	288.00 Orang/bulan	154 orang/bulan	921 orang / bulan	63.96%
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	0 dokumen	dokumen	dokumen	0.00%	4.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1 dokumen	8.33%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1.00 Laporan	1.00 Laporan	4 dokumen	80.00%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	4.00 Dokumen	2.00 Dokumen	13 dokumen	65.00%
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Sesuai Kebutuhan**	100 %	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.00%	4.00 Laporan	1.00 Laporan	13 dokumen	65.00%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu**	100 %	40.00%	100.00%	80.00%	80.00%	**100.00 %**	**-**	40.00%	**45.00%**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	1 paket	Paket	Paket	0.00%	1.00 Paket	-	1 paket	50.00%
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120 Dokumen	48 dokumen	8 Dokumen	6 Dokumen	80.00%	24.00 Dokumen	6.00 Dokumen	60 Dokumen	50.00%
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 orang	20 orang	orang	orang'	0.00%	-	-	20 orang	41.67%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**		40.00%	100.00%	75.00%	75.00%	**100.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	24 paket	12 Paket	8 Paket	67.00%	12.00 Paket	3.00 Paket	35 paket	58.33%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	24 paket	12 Paket	10 Paket	83.00%	12.00 Paket	6.00 Paket	37 paket	61.67%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	24 paket	12 Paket	6 Paket	50.00%	12.00 Paket	3.00 Paket	33 paket	55.00%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 paket	24 Paket	12 Paket	9 Paket	75.00%	12.00 Paket	4.00 Paket	36 paket	0.60%

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	24 paket	12 Paket	10 Paket	83.00%	12.00 Paket	3.00 Paket	37 paket	0.62%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 laporan	0 laporan	12 Laporan	0 Laporan	0.00%	4.00 Laporan	-	0 laporan	0.00%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132 laporan	24 laporan	24 Laporan	21 Laporan	87.00%	24.00 Laporan	3.00 Laporan	45 laporan	34.09%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100 %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**0.00%**	0.00%	**0.00%**
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	-	0 unit	0.00%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	0 unit	0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	-	0 unit	0.00%
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	-	0 unit	0.00%
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	-	0 unit	0.00%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100 %	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	24 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	6.00 Laporan	39 laporan	65.00%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	24 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	6.00 Laporan	39 laporan	65.00%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	100 %	40.00%	100.00%	85.00%	85.00%	**86.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit mobil 20 motor	4 unit mobil 8 motor	2 unit mobil 4 motor 1 torca	2 unit mobil 4 motor 1 torca	100.00%	6.00 Unit	3.00 Unit	8 unit mobil 12 motor	68.97%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit/tahun	8 unit / tahun	10 unit/tahun	4 unit/tahun	50.00%	10.00 Unit	-	12 unit / tahun	24.00%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	1 unit	unit	unit	0.00%	1.00 Unit	-	1 unit	25.00%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 unit	unit	unit	0.00%	unit	-	0 unit	0.00%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**86 poin**	80 poin	**82 poin**	**82 poin**	100.00%	**86.00 Point**	**-**	80 poin	**93.02%**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain**	**100.00%**	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	2.00 Laporan	-	3 laporan	37.50%
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**100%**	40.00%	100.00%	75.00%	75.00%	**100.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50.00%	2.00 Dokumen	-	6 dokumen	37.50%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan**	**100%**	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	**100.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45 laporan	15 laporan	3 laporan	3 laporan	100.00%	4.00 Laporan	2.00 Laporan	19 laporan	42.22%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**86 poin**	80 poin	**82 poin**	**82 poin**	100.00%	**86.00 Point**	**-**	80 poin	**93.02%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100.00%**	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	4 kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	2.00 Laporan	1.00 Laporan	6 kegiatan	60.00%
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemsyarakatan yang Terfasilitasi**	**100%**	40.00%	100.00%	80.00%	80.00%	**100.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 lembaga	4 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	2 lembaga	2 Lembaga	6 lembaga	66.67%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15 laporan (Bumdes,DanaBergulir,Kartu Tani)	4 laporan	3 Laporan	0 Laporan	0.00%	1.00 Laporan	-	4 laporan	26.67%
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 laporan	0 laporan	laporan	laporan	0.00%	1.00 Laporan	-	0 laporan	0.00%
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**0**	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00 %**	**-**	0.00%	**0.00%**
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	-	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	-	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	30.00 Keluarga	0 keluarga	0.00%

7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	-	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	-	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	30.00 Keluarga	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	30.00 Keluarga	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	-	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	-	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	30.00 Keluarga	0 keluarga	0.00%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**86 poin**	80 poin	**82 poin**	**82 poin**	100.00%	**86.00 Point**	**-**	80 poin	**93.02%**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	**100.00 %**	**-**	20.00%	**20.00%**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30 laporan	2 laporan	6 Laporan	0 Laporan	0.00%	1.00 Laporan	-	2 laporan	20.00%
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	40.00%	100.00%	70.00%	70.00%	**100.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**

7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60 laporan	24 laporan	12 Laporan	9 Laporan	70.00%	12.00 Laporan	5.00 Laporan	31 laporan	51.67%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**86 poin**	80 poin	**82 poin**	**82 poin**	100.00%	**86.00 Point**	**-**	80 poin	**93.02%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00 %**	**-**	45.00%	**45.00%**
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1500 Orang	600 orang	300 orang	300 orang	100.00%	300.00 Orang	150.00 Orang	900 orang	60.00%
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1500 Orang	600 orang	300 orang	300 orang	100.00%	300.00 Orang	150.00 Orang	990 orang	66.00%
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	-	4 dokumen	50.00%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	27 laporan	56.25%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Desa Mandiri**	**6 Desa**	2 desa	**1 Desa**	**1 Desa**	100.00%	**1.00 Desa**	**-**	3 desa	**50.00%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00 %**	**-**	40.00%	**45.00%**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30 dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%	6.00 Dokumen	1.00 Dokumen	19 Dokumen	63.33%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%	6.00 Dokumen	-	19 Dokumen	63.33%
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0.00%
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4 Dokumen	80.00%
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0.00%
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4 laporan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0.00%

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1) Adanya kebijakan anggaran parsial sehingga mempengaruhi pada penatausahaan keuangan;
2) Ketentuan komposisi cash budget semester I sebesar 50% dan semester II sebesar 50%, yang mana pada semester I memfokuskan pada belanja wajib mengikat, sehingga kegiatan lain dilaksanakan pada semester II;

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 maka diperlukan percepatan untuk mencapai target Renja pada Tahun 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada diwilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi. Namun begitu tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Cilengkrang berdasarkan Tugas Pokok Kecamatan bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelimpahan

kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat yang telah diubah dengan Keputusan Bupati nomor 137.1/Kep.467-Tapem/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. Selain itu Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Fungsi Kecamatan yang sekaligus Menjadi Fungsi Camat yaitu :

1) Penyelanggaraan koordinasi, penyelanggaraan pengendalian, Fasilitasi, integrasi, sinkronisasi, perumusan dan pengaturan, serta pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
2) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cilengkrang telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2025 – 2029 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Cilengkrang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel T-C 29 (Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan).

Analisis Kinerja Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung merupakan kajian terhadap capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan Renstra 2021-2026, Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan.

TABEL

CAPAIAN KINERJA KECAMATAN CILENGKRANG

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRAS PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintan (LKIP)	70	71	77	79	80	72.06	76.08	79.80
2	Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik	84	85	86	87	88	83.00	85.00	84.89
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78	80	82	84	86	78.00	80.00	84.01
4	Persentase Desa yang dibina	100	100	100	100	100	83.49	95.00	95.00

Pencapaian Kinerja Kecamatan Cilengkrang selama tahun 2025 dalam berbagai bidang baik bidang pemerintahan, pembangunan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, maupun pembangunan infrasturktur hasil Musrenbang tahun 2024 yang terealisasi pada tahun 2025.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cilengkrang dapat terealisasi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan diantaranya

1. Pada bidang Pemerintahan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan:
   - dilaksanakan pembinaan tiga bulan sekali, kepada aparat Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan desa dengan materi masalah pemerintahan dan sosial dari semua Seksi di lingkungan Kecamatan Cilengkrang serta pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
   - Kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya dan berkala adalah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, sosialisasi DD, ADPD dan Bantuan Gubernur, evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, serta monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
   - Dalam bidang Kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP Elektronik (KTP el), serta untuk tertibnya administrasi

kependudukan dilaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan publik alam bidang kependudukan dengan dilaksanakannya pelayanan kependudukan secara mobile di desa desa dan telah hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri di Desa Jatiendah dan Desa Girimekar

- Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, KK, surat keterangan pindah, dan surat-surat kependudukan lainnya, telah terlayani dengan baik, dan seluruh permohonan telah diproses sesuai SOP yang berlaku.
- Pengecekan dalam pengetikan Susunan Akhli Waris

2. Pada bidang Sosial dan Budaya, telah dilaksanakan kegiatan berupa:
   - Pembinaan puskesos di 6 desa
   - Berkoordinasi dengan TKSK, PSM dan Fasilitator PKH
   - Berkoordinasi dengan para kasi kesra selaku ketua puskesos, karang taruna, SLRT sebagai pilar-pilar sosial di tiap desa yang menangani permasalahan sosial di tiap desa
   - Berkoordinasi dengan elemen-elemen kepemudaan yang berada di bawah KNPI
   - Berkoordinasi dengan Korwil TK/SD kaitan dengan pelaksanaan UAN dan kebijakan Bupati Bandung tentang pemberian insentif bagi para guru ngaji
   - Monitoring pelaksanaan pendistribusian Bansos Sembako/BPNT di tiap desa
   - Membentuk tim koordinasi Bansos Sembako Tingkat Kecamatan
   - Mendorong terbentuknya Timlak Bansos Sembako tingkat desa
   - Memasyarakatkan kegiatan keolahragaan bersama Kormi Tingkat Kecamatan
   - Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan
   - Mendorong terbentuknya Gerai UPZ tiap desa
   - Mendorong kreatifitas pemuda dalam giat seni dan budaya
   - Membina dan mengkoordinasikan kegiatan seni benjang di wilayah kecamatan cilengkrang dalam kegiatan Festival Benjang yang diselenggarakan oleh Disparbud Kab Bandung dan Paguyuban Seni Benjang (Paseban) wilayah Kecamatan Cilengkrang
   - Memfasilitasi kegiatan olahraga Bupati Cup dalam cabang olahraga Pencaksilat, Tenis Meja dan sepakbola U 16.
   - Memfasilitasi pendistribusian bansos Sembako dari pusat, provinsi dan kabupaten

- Berkoordinasi dengan Korwil pendidikan tingkat kecamatan, Ormas dan OKP
- Berkoordinasi dengan unsur-unsur penggerak kegiatan keagamaan tingkat kecamatan, yaitu DKM, MUI, KUA dan Ormas Islam
- Melaksanakan monev Dana Desa, ADPD, dan Bantuan Gubernur
- Mendorong LLI eksis di Kecamatan
- Berkoordinasi dengan PT POS berkenaan dengan bansos Covid-19
- Mendistribusikan BNBA penerimaan Bansos
- Menginventarisir data olahraga tiap desa
- Memberikan rekomendasi proposal kegiatan social dan keagamaan
- Pembinaan karang taruna ke desa-desa
- Berkoordinasi dengan LLI dan KORMI Kecamatan Cilengkrang
- Pembinaan dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

3. Pada Bidang Pembangunan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan:
   - Melaksanakan pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap bantuan-bantuan seperti ADPD, raksa desa, bantuan gubernur dan Dana Desa ke desa-desa, terutama kegiatan fisik dan laporan pertanggung jawaban (SPJ),
   - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga; pembangunan jaringan irigasi, pembangunan rutilahu, rehab jalan beton dan hotmix, Penerangan Jalan Umum.
   - Fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup dan pengkoordinasian bahan pengawasan dan pengendalian fungsi daerah aliran sungan (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik teknis/non teknis serta pengelolaan dan pemanfataan sumber daya air dan pertambangan.
   - Sosialisasi edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, dan sosialisasi penyelenggaraan prasarana pelayanan umum
   - Monitoring evaluasi kegiatan operasi bersih yang dilaksanakan oleh kader lingkungan Bandung Bedas Bersih Sampah (B3S)
   - Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pelayanan Perijinan Menggunakan Bangunan (PBG) dan perizinan OSS RBA bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
   - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Rutilahu dari Dinas Perkimtan dan Monev Fasos dan Fasum

4. Pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Cilengkrang kondisi ketentraman dan ketertiban selama ini berjalan cukup aman, lancar dan tertib berkat adanya koordinasi yang baik dan terpadu antar Pemerintahan Kecamatan, Polsek dan Koramil setempat serta Kasi terkait. Beberapa langkah yang telah diambil dalam usaha memelihara ketentraman dan ketertiban, antara lain :

- Memelihara, memupuk serta mengawasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penyuluhan ke tiap desa secara periodik bersama unsur terkait, kaitan dengan pendataan bangunan liar, tower, mini market dan warnet, penertiban perijinan perusahaan, penertiban kontrakan, penertiban banner dan reklame.
- Meningkatkan pengawasan, dan kesiapsiagaan di setiap Kantor Pemerintahan dan Desa-desa dengan patrol wilayah, mengintensifkan pelaksanaan Piket anggota dan karyawan kantor, pemberdayaan Siskamling, pembinaan linmas dan pengefektifan Pos Kamling yang telah ada.
- Bekerjasama dengan Kapolsek dan Koramil memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan surat-surat, antara lain: Surat Keterangan Kelakuan Baik dan surat ijin Rame-rame, pemberantasan miras, penertiban pedagang kaki lima, penertiban pasar tumpah, penertiban baligo, pembinaan PKL, razia anak funk dan PSK, serta penertiban dan pembongkaran bangunan liar/bangli.
- Bekerjasama dengan kasi pembangunan dalam penerbitan perijinan baik IMB maupun perijinan lainnya terutama dalam hal persyaratan dan cek lokasi terhadap pemohon.
- Melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- Melaksanakan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan
- Melaksanakan upaya pencegahan serta penanggulangan bencana alam, sadar hukum dan terpeliharanya hakl asasi manusia (HAM)
- Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat serta anggota Linmas Siaga Kecamatan dan Linmas Siaga Desa
- Melaksanakan pam jalur/lalin dalam acara kunjungan kerja pejabat
- Membantu penyaluran air bersih ke daerah bencana rawan kekeringan
- Monitoring pengamanan kegiatan penyaluran bantuan-bantuan ke desa- desa

- Melaksanakan pengamanan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat
- Pemantauan/pengontrolan lokasi check point Pengawasan orang dalam perjalanan mudik di wilayah Kecamatan Cilengkrang
- Koordinasi ke desa-desa terkait data kekeringan

5. Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu telah melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:
   - Pembinaan organisasi perempuan
   - Pembinaan TP PKK kaitan dengan 10 program pokok PKK
   - Monitoring dan evaluasi posyandu
   - Pembinaan desa wisata
   - Pembinaan, monitoring dan evaluasi Bumdesa dan UMKM
   - Monitoring, pembinaan, verfikasi, mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen, rekomendasi, dan evaluasi terkait Dana Desa, Bantuan Gubernur, ADPD
   - Pembinaan P2TP2A dan melaksanakan sosialisasi kesetaraan gender, pembinaan perempuan dan perlindungan anak
   - Sosialisasi kecamatan sehat dan pemberdayaan masyarakat/ FKKS
   - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Vaksinasi Masal bagi masyarakat kecamatan cilengkrang
   - Pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Analisis Kinerja Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan Renstra 2021-2026 dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel TC 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilengkrang
Kabupaten Bandung

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KECAMATAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Sakip** **Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**		**Point** **%**	**70 point** **84 %**	**71 point** **85 %**	**77 point** **86%**	**80 point** **87%**	**81 point** **88 %**	**72,06 Poin** **83,63%**	**76.08 point** **85 %**	**79,80 point** **84,89%**	**80 point** **87%**	**81 point** **88 %**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Dokumen	na	na	na	1 Dokumen	1 Dokumen	na	na	na	1 Dokumen	1 Dokumen	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Data	na	na	na	1 dokumen	1 dokumen	na	na	na	1 dokumen	1 dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang / bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/ 14 bulan	24 orang/ 14 bulan	24 orang/ 12 bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen	dokumen	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	dokumen	Dokumen	NA	4 dokumen	4 dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan**		%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**90%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Capaian PAD**		%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**20%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Dokumen	12 laporan	12 laporan	laporan	laporan	laporan	5 laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu**		**68**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75%**	**0%**	**80%**	**100%**	**100%**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	paket	paket	paket	1 paket	1 paket	paket	paket	PAKET	1 paket	1 paket	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	20 Dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	Dokumen	6 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	orang	24 orang	24 orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**90%**	**0%**	**75%**	**100%**	**100%**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	8 paket	1 paket	1 paket	
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	10 paket	1 paket	1 paket	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	Peket	Peket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	6 paket	1 paket	1 paket	
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Penyediaan Bahan		Paket	Peket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	9 paket	12 paket	12 paket	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	10 paket	9 paket	1 paket	1 paket	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	1 paket	paket	paket	paket	paket	paket	paket	Paket	paket	paket	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 Laporan	laporan	4 laporan	4 laporan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	36 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	21 laporan	24 Laporan	24 Laporan	

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**%**	**83%**	**84%**	**85%**	**86%**	**87%**	**0%**	**0%**	**0%**	**86%**	**87%**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	unit	unit	unit	1 unit	1 unit	unit	unit	unit	1 unit	1 unit	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket	Paket	Paket	Paket	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	1 Paket	Paket	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	3 unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	unit	unit	unit	1 unit	1 unit	unit	unit	unit	1 unit	1 unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	unit	unit	unit	1 unit	unit	unit	unit	unit	1 unit	unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**-**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**		**%**	**83%**	**84%**	**85%**	**86%**	**87%**	**75%**	**0%**	**85%**	**86%**	**87%**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	3 unit mobil 4 motor	3 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil / 4 unit motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	8 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun	6 unit/tahun	8 unit / tahun	4 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	unit	unit	unit	1 unit	1 unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara		unit	Unit	Unit	Unit	2 unit	2 unit	unit	unit	unit	2 unit	2 unit	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**Point**	**78 poin**	**80 poin**	**82 poin**	**84 poin**	**86 poin**	**86 poin**	**o poin**	**82 Poin**	**84 poin**	**86 poin**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**50.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan	6 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**90%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Laporan	laporan	6 Laporan	-	-	-	laporan	-	laporan	-	-	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**90%**	**0%**	**75%**	**100%**	**100%**	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	4 dokumen	4 dokumen	
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		unit	1 unit					1 Laporan		-			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**85%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	7 laporan	7 laporan	8 laporan	3 Laporan	9 laporan	7 laporan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**Point**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0.00%**	**82 poin**	**100%**	**100%**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0.00%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Laporan	2 lembaga	2 lembaga	lembaga	lembaga	lembaga	2 lembaga	lembaga	lembaga	lembaga	lembaga	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan		Laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 laporan	2 laporan	2 kegiatan	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi**		**%**	**78.00**	**80.00**	**82.00**	**84.00**	**100%**	**100%**	**0%**	**80%**	**84.00**	**100%**	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Lembaga	1 Lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	laporan	2 Laporan	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 Laporan	laporan	1 laporan	1 laporan	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Laporan	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	Laporan	1 laporan	1 laporan	

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**%**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan KKesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**Point**	**78.00**	**80.00**	**82.00**	**84.00**	**100%**	**78.00**	**80.00**	**82 poin**	**84.00**	**100%**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**%**	**100%**	**8000%**	**8200%**	**8400%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**8400%**	**100%**	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	2 laporan	2 laporan	laporan	6 laporan	6 laporan	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**70%**	**100%**	**100%**	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	12 laporan	12 laporan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**Point**	**78.00**	**80.00**	**82.00**	**84.00**	**100%**	**78.00**	**80.00**	**82 poin**	**84.00**	**100%**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Orang	300 Orang	-	-	-	-	270 orang	-	-	-	-	

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang MengikutiFasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Orang	-	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	orang	220 orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	270 orang	150 orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	12 Dokumen	12 dokumen	12 laporan	12 laporan	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah Desa Berkategori Baik**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang dibina**		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	4 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Laporan	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 laporan	0 Dokumen	

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cilengkrang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Dilingkungan Kabupaten Bandung, hal-hal yang menjadi tugas pokok Kecamatan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kecamatan Cilengkrang mengidentifikasi beberapa isu strategis di beberapa bidang, diantaranya adalah:

1. Pelayanan adminitrasi kependudukan terkendala pada Aplikasi pendaftaran pelayanan adminitrasi kependudukan
2. Adanya peraturan yang terus berubah terutama dalam hal perencanaan Pembangunan sehingga perlu adanya penyesuaian tugas pokok dan fungsi kecamatan.
3. Belum sesuainya penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas.
4. Pemahaman pegawai terkait standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan masih rendah
5. Desa di wilayah Kecamatan Cilengkrang baru ada 3 desa berkembang dan 3 desa maju, belum ada desa mandiri.
6. Pelaksanaan adminitrasi Pengelolan bantuan keuangan desa belum masuk kategori baik terlihat hasil pembinaan dan pengawasan, masih terjadi keterlambatan peng SPJ an.
7. Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat karena pandemi covid 19 dan resesi ekonomi
8. Pengelolaan Bumdes yang ada di desa desa belum optimal dan berkontribusi positif bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.
9. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah
10. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
11. Belum adanya fasilitas sosial dan fasilitas umum dari perumahan/ komplek yang diserahkan kepada pemerintah desa ataupun kabupaten dengan kondisi fasos dan fasum dengan keadaan kurang baik.
12. Data masyarakat penyandang masalah sosial belum tersedia dengan baik sesuai dengan kondisi rill di masyarakat
13. Data Rumah Tidak layak huni belum tersedia dengan baik
14. Terdapat sumber mata air yang dikelola oleh pihak swasta dan perorangan
15. Menurunya daya beli masyarakat akibat adanya gejolak perekonomian di

dalam dan luar negeri

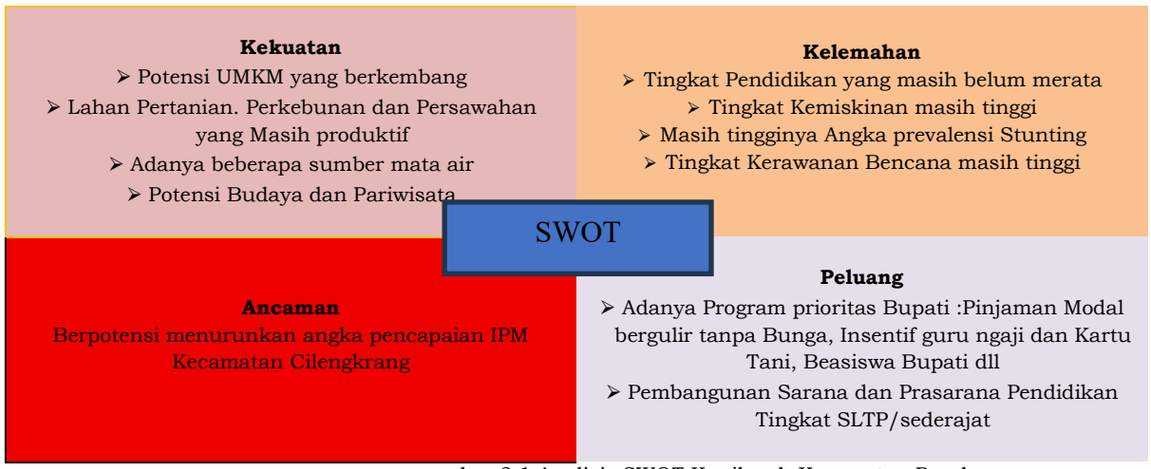
16. Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan belum optimal
17. Mulai lunturnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial
18. Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan Cilengkrang masih kurang dan keadaan peralatan dan perlengkapan kantor banyak yang rusak berat dan juga Gedung kantor, rumah dinas dan Gedung olahraga kecamatan kondisinya rusak berat dan belum adanya penambahan anggaran untuk rehabilitasi/perbaikan dari tahun 2019.
19. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal.

Melihat permasalahan di atas, Kecamatan Cilengkrang melakukan upaya penanganan, antara lain:

1. Pengkoordinasian dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk penyediaan blanko dan ribbon e KTP
2. Memberikan pendidikan/pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kapasitasnya serta penempatan pegawai yang berkompeten
3. Meminta kepada Pemerintah kabupaten bandung untuk menganalisa dan mengevaluasi tufoksi kecamatan pasca adanya Permen PANRB tentang Penyederhanaan dan penyetaraan birokrasi serta tata hubungan kerja penyelenggara pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif untuk tertib adminitrasi dan meningkatkan status desa
5. Memaksimalkan kerjasama dengan aparat keamanan terutama dengan polsek dan koramil, serta meningkatkan patrol wilayah
6. Sosialisasi penanganan masalah sampah ke masyarakat serta perbaikan manajemen bagi pengelolaan sampah di Kecamatan Cilengkrang
7. Peningkatan pengadaan sarana dan pengelolaan sampah yang dilaksanakan rutin setiap tahun
8. Pembinaan dan Pengawasan kepada bumdes serta Pembinaan dan Pengawasan kepada UMKM secara intensif melalui program dana bergulir
9. Melakukan pendekatan kepada para pengembang perumahan untuk menyiapkan fasos dan fasum dan adminitrasi sebagai syarat penyerahan fasos fasum kepada pemerintah.
10. Melaksanakan tertib adminitrasi dalam pengelolan data, rumah berijin. Rumah tidak layak huni.

11. Melaksanakan tertib adminitrasi dalam pengelolan data masyarakat penyandang masalah sosial
12. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga kemasyarakat
13. Meningkatkan kooridinasi dan konsultasi kepada dinas terkait dalam hal penganggulanan masalah sosial di masyarakat
14. Mendorong pemerintah desa untuk membeli asset masyarakat yang mempunyai potensi sumber air bersih untuk di kelola oleh desa.
15. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan kecamatan dengan memohon anggaran pengadaan peralatan perlengkapan kantor serta perbaikan/rehabilitasi Gedung kantor, rumah dinas dan Gedung olahraga dari tahun 2019 kepada Tim Angggaran Pemerintah Daerah. Namun sampai tahun 2024 belum diberikan penambahan anggaran.
16. Selain permohonan penambahan anggaran untuk penambahan, perbaikan / rehab sarana dan prasarana kantor kecamatan, diperlukan juga adanya penambahan operasional bagi kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan serta pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat.
17. Memaksimalkan peran kecamatan sebagai Perangkat Daerah dengan mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan Kecamatan Paseh memetakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) berdasarkan pendekatan kewilayahan pada masing-masing wilayah Kecamatan. Menurut Freddy (2013), analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Gambar berikut ini menjabarkan kondisi Kecamatan Cilengkrang sesuai dengan analisis SWOT sebagai dasar untuk penentuan program yang akan dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cilengkrang dalam menyelesaikan isu strategis Kabupaten Bandung.



gambar 2.1 Analisis SWOT Kewilayah Kecamatan Paseh

Dari analisis SWOT tersebut menghasilkan rekomendasi untuk menyelesaikan isu strategis yang diharapkan menjadi basis perencanaan yang mendukung program yang mendasari Kewilayahan pada tahun 2026 Menindaklanjuti isu strategis yang terdapat di Kecamatan Cilengkrang, Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Cilengkrang Kabupaten merencanakan pelaksanaan program kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Upaya untuk Peningkatan kapasitas SDM Aparatur, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta ketersediaan sarana dan Prasarana untuk pelayanan Publik;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai Upaya Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan publik mulai dari sosialisasi, pengkoordinasian sarana dan prasarana pelayanan umum, dan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan, serta Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, termasuk di dalamnya 13 program strategis Bupati;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai Upaya untuk Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Musdes, Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan termasuk di dalamnya PKK, Posyandu, Dasawisma, KL, dan percepatan penanganan/pencegahan stunting, rembug stunting, pengembangan usaha ekonomi, dan Fasilitasi Pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kapasias Lembaga kemasyarakatan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai Upaya untuk meningkatkan Kerjasama/ sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal dalam Peningkatan wawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Penerapan dan Penegakan Perturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, pencegahan, pelaksanaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban yang ada di Wilayah Kecamatan Paseh;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, sebagai Upaya untuk meningkatkan Wawasan kebangsaan, dan Cinta Tanah air karena di dalamnya terdapat kegiatan untuk memperingati Hari Bersejarah, dan Hari Besar lainnya;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa, karena di dalamnya terdapat kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi terhadap Pemerintahan Desa dan Lembaga yang ada di Desa, mulai dari Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Tata Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, serta Pelaksanaan Pilkades.

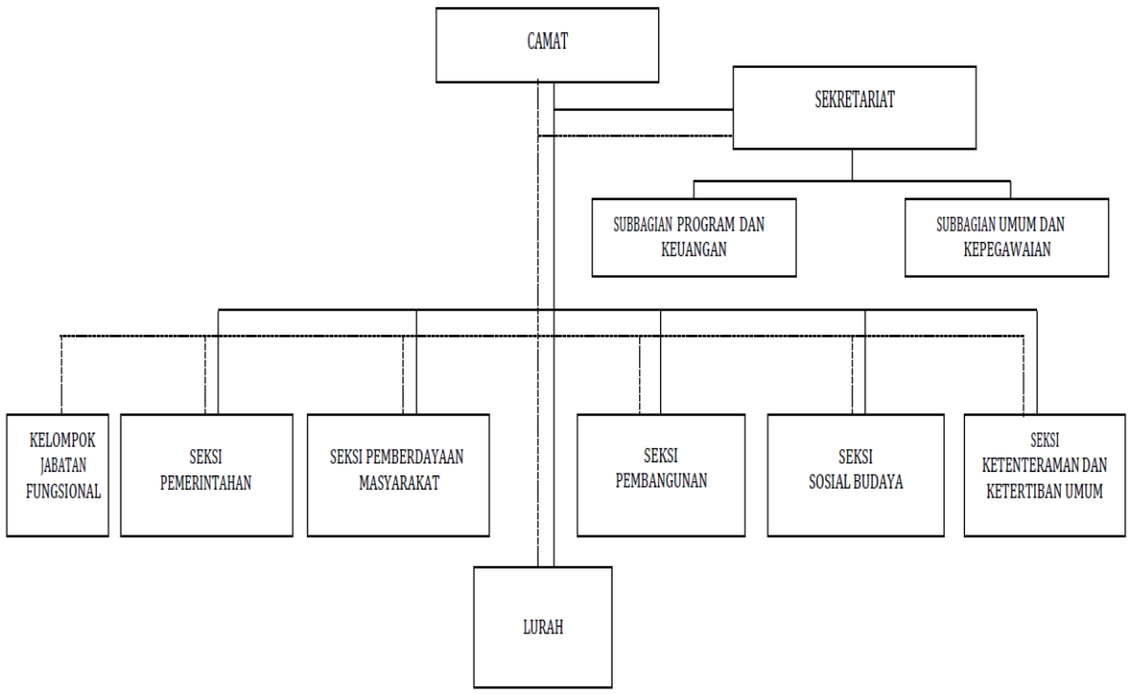
Kecamatan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di lingkungan Kecamatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, seksi, dan kelompok jabatan fungsional menurut lingkup tugasnya masing-masing. Camat baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Perangkat Daerah/instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan Organisasi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung terdiri atas :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan
c. Seksi Pemerintahan umum
d. Seksi Sosial Budaya
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
g. Seksi Pembangunan
h. Subbagian Program dan Keuangan
i. Subbagian Umum dan Kepegawaian
j. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Cilengkrang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya ;
b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat mempunyai sub tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya;
b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, sosial budaya dan ketenteraman ketertiban umum, di tingkat Kecamatan;
d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui:
   1) fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
   2) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
   3) fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
   4) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   5) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
   6) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
   7) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
   8) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
   9) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
   10) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
   11) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   12) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
   13) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
   14) fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
   15) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
   16) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
   17) koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
   18) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,

pembangunan, sosial budaya dan ketenteraman ketertiban umum, di tingkat Kecamatan;

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, sosial budaya dan ketenteraman ketertiban umum, di tingkat Kecamatan;
g. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan perangkat daerah terkait;
h. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan perangkat daerah terkait;
i. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan umum, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum dan prasarana dan sarana umum;
j. menyelenggarakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
k. menyelenggarakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan dasar pada wilayah kerjanya;
l. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
m. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan;
n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
o. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
p. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
q. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;

r. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Kecamatan;
t. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
u. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
v. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
w. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
x. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
y. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Kecamatan; dan
z. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dilakukan dengan Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Pada tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat perbedaan yang signifikan dikarenakan adanya Perubahan BSO dan kekurangan kebutuhan anggaran sehingga terjadi pergeseran antar sub kegiatan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada.

Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan. Adapun Review rancangan awal RKPD Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 sebagimana yang tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahunan yang menjadi acuan dalam menerapkan program/kegiatan, dapat dilihat pada tabel T-C.31di bawah:

T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN BANDUNG

NO	RANWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kec Cilengkrang	**Nilai SAKIP** **BMD dalam Keadaan Baik**	**81 point** **90 %**	**4,480,833,900**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kec Cilengkrang	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** **Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah**	**62 point** **48 Point**	**5,135,045,162**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**50,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**Nilai Akip**	**81 Point**	**49,627,300**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	14,362,000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,140,400
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,690,400
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,140,400
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,690,400
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4,053,300
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,990,400
1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	NA	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2,280,000
1.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	NA	0	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,280,000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**4,041,837,600**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**93%**	**4,605,926,500**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	4,030,667,600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	4,596,100,000
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	2,520,000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	4,006,500
2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	4,170,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3,300,000
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan**	**100%**	**3,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**	**85%**	**3,300,000**
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	3,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	3,300,000
4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Capaian PAD**	**100%**	**0**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Capaian PAD**	**0%**	**0**
4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0
5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu**	**100%**	**13,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu**	**88%**	**36,920,000**
5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	25,000,000
5.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	3,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	11,920,000
5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100%**	**52,697,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**88%**	**89,136,442**
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,999,600

NO	RANWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
6.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	34,913,800
6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13,153,490
6.4	Penyediaan Bahan Logistik	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	12 paket	6,000,000	Penyediaan Bahan Logistik	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	12 paket	11,876,300
6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5,697,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11,793,252
6.6	Penyediaan Bahan/Material	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0	Penyediaan Bahan/Material	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0
6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	3,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0
6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	11,400,000
7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**87%**	**30,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**80%**	**36,592,000**
7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	20,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	36,592,000
7.2	Pengadaan Mebel	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	Pengadaan Mebel	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-
7.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-
7.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	10,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
7.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
7.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**210,079,300**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**175,812,920**
7.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	40,519,300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24,586,920
7.8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	169,560,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	151,226,000
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**	**87%**	**80,220,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**	**87%**	**137,730,000**
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit mobil 4 motor	35,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit mobil 4 motor	67,740,000
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit/tahun	5,220,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit/tahun	10,000,000
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	59,990,000
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	2 unit	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	unit	0
	Jumlah 1				**4,480,833,900**	**Jumlah 1**				**5,135,045,162**
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec Cilengkrang	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**86 poin**	**114,999,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec Cilengkrang	**Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat**	**89.00%**	**214,774,900**
1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec Cilengkrang	**Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100.00%**	**0**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec Cilengkrang	**Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**0.00%**	**0**
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 laporan	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 laporan	0

NO	RANWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kec Cilengkrang	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan**	**100%**	**4,999,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kec Cilengkrang	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan**	**96%**	**7,530,000**
2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0
2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4,999,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7,530,000
3	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Kec Cilengkrang	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**100%**	**10,000,000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Kec Cilengkrang	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**92%**	**38,610,000**
3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen	10,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen	38,610,000
3.2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec Cilengkrang	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		0	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec Cilengkrang	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		0
4	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec Cilengkrang	**Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan**	**100%**	**100,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec Cilengkrang	**Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan**	**87%**	**168,634,900**
4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 laporan (KORMI,Keagamaan,FKKS,KLA,POKJANAL KEC dll)	100,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	168,634,900
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec Cilengkrang	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**86 poin**	**70,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec Cilengkrang	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84.00%**	**125,283,900**
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec Cilengkrang	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**100%**	**15,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec Cilengkrang	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**97%**	**27,060,000**
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	0
1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	laporan	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	laporan	0
1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 kegiatan	15,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 kegiatan	27,060,000
2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kec Cilengkrang	**persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**100%**	**17,000,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kec Cilengkrang	**persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**84%**	**46,768,900**
2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	10,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga	35,553,900
2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 laporan (Bumdes,DanaBergulir,Kartu Tani)	4,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	4,225,000
2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	3,000,000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	6,990,000
3	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**0**	**38,000,000**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**82%**	**51,455,000**
3.1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30 Keluarga	3,000,000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	0
3.2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	3,000,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	0
3.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	3,000,000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	7,800,000
3.4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30 Keluarga	3,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	0

NO	RANWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
3.5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	3,000,000	Peningkatan KKesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan KKesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	4,550,000
3.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	3,000,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 Keluarga	15,540,000
3.7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	3,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	4,225,000
3.8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	3,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	4,225,000
3.9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga	3,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	0
3.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	4,000,000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	4,225,000
3.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	4,000,000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0
3.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	3,000,000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60 Keluarga	10,890,000
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec Cilengkrang	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**86 poin**	**28,725,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec Cilengkrang	**Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**78.00%**	**66,840,000**
1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kec Cilengkrang	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**4,725,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kec Cilengkrang	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**78%**	**18,840,000**
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 laporan	4,725,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporam	18,840,000
2	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**24,000,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**79%**	**48,000,000**
2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	24,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	48,000,000
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec Cilengkrang	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**86 poin**	**44,760,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec Cilengkrang	**Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**97.00%**	**154,410,000**
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**44,760,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec Cilengkrang	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**154,410,000**
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 ORANG	53,750,000
1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	300 Orang	11,760,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	orang	0
1.3	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	10,000,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350 ORANG	43,000,000
1.4	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	3,000,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	17,580,000
1.5	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dokumen (gurungaji pendidikan Sosial)	20,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	40,080,000
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec Cilengkrang	**Jumlah Desa Berkategori Baik**	**1 Desa**	**42,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec Cilengkrang	**Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa**	**100%**	**59,700,000**

NO	RANWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec Cilengkrang	**Persentase desa yang dibina**	**100%**	**42,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec Cilengkrang	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**59,700,000**
1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	8,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	17,580,000
1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	11,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	17,580,000
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0
1.4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	18,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	24,540,000
1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	2,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban embaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0
1.6	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	2,500,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	0
					300,484,000					**621,008,800**
					4,781,317,900					**5,756,053,962**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 dan pelaksaaan tahun ke-lima dari RPJMD periode 2021-2026. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui

Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui aplikasi SIPD untuk di verifikasi dan dibawa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan.

Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan. Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait.

Adapun Skala Prioritas Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui proses rasionalisasi di tingkat Kabupaten, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUMEN	CATATAN
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diaktualisasikan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2026.

Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2026 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggarakan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

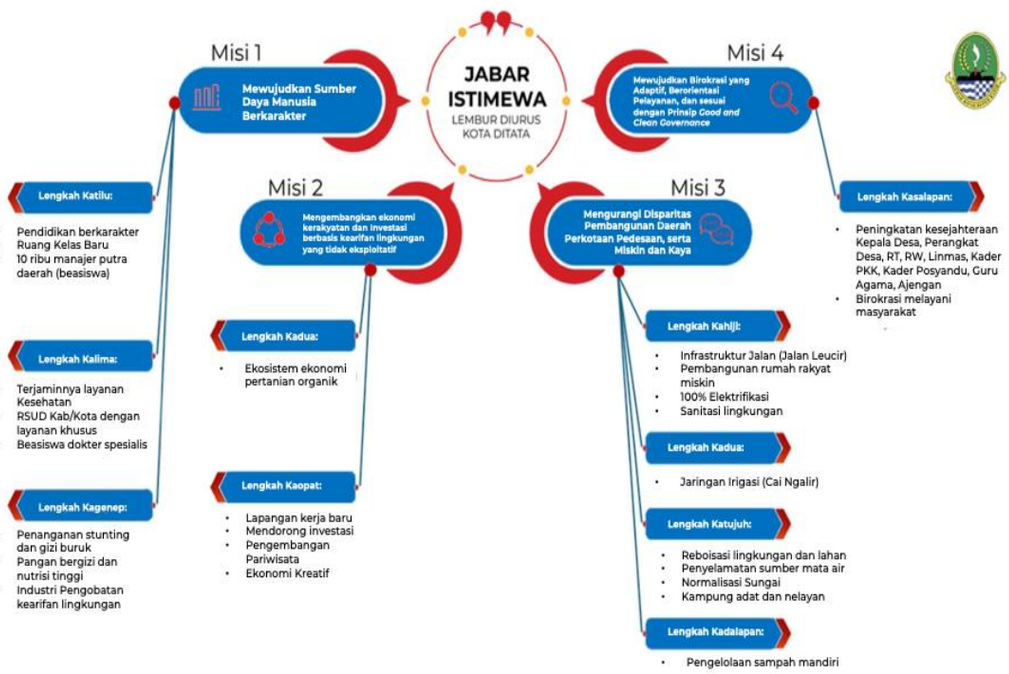
Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, masuk kedalam Asta Cita 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Dengan Visi "**Jawa Barat Istimewa**" adalah visi yang digunakan untuk menggambarkan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam periode pemerintahan tertentu, khususnya dalam konteks RPJMD dan Renstra Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah penelaahan terhadap konsep "Jawa Barat Istimewa" dan bagaimana visi ini dijalankan dalam berbagai program dan kebijakan pembangunan di daerah.

- **Istimewa,** komitmen pemerintah provinsi Jawa Barat dalam memberikan pembangunan dan pelayanan publlk yang terbaik untuk kesejahteraan Masyarakat
- **Lembur Diurus,** Pembangunan wilayah pedesaan sebagai Kawasan pertanian dan konservasi yang dikelola untuk memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup
- **Kota Ditata**, Pembangunan wilayah perkotaan sebagai Kawasan perdagangan barang dan jasa, serta Kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah



Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diantaranya :

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter
2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif
3) Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
4) Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance

Dengan program prioritas terdiri dari :

a) Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi
b) Program Peningkatan dan Pemerataan Layanan Kesehatan Primer dan Layanan Pengobatan Tradisional
c) Program Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi dan Nutrisi bagi Anak, Balita, serta Ibu Hamil dan Menyusui
d) Program Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Lokal dan Informal
e) Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama
f) Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Pemuda dan Perlindungan Kelompok Rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas
g) Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
h) Program Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri
i) Program Pengembangan Kewirausahaan Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan
j) Program Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD
k) Program Penguatan Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
l) Program Pengendalian Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
m) Program Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
n) Program Pengembangan digitalisasi sektor Ekonomi Strategis
o) Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan peningkatan kesejahteraan petani

p) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan
q) Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah
r) Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan
s) Program Pengelolaan Sampah Mandiri dan Terpadu
t) Program Pelestarian, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
u) Program Peningkatan Ketahanan Air dan Energi
v) Program Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
w) Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional
x) Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
y) Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah

Pemerintah Provinsi Jawabarat membuat 9 Langkah Ngawangun Jawa Barat diantaranya :

1) Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/bebas buang air besar sembarangan);
2) Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya;
3) Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat;

4) Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan;
5) Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat;
6) Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan;
7) Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan;
8) Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS);
9) Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, LInmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Bandung

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perumusan visi dan misi RPJMD tidak hanya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah, tetapi juga harus mengacu pada RPJPD guna memastikan kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak

Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius. Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan

kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu misi ini mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Upaya ini dilakukan melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang menyeluruh, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dapat bersaing di tingkat lokal maupun global. Dalam mencapai tujuan ini, penguatan nilai-nilai religius juga ditekankan untuk membentuk individu yang memiliki integritas, etika, dan moral yang tinggi. Selain itu, misi ini juga menitikberatkan pada penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini diwujudkan melalui program-program yang mendukung perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kepemimpinan. Selain itu, misi ini juga mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi,

tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi

Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap

dampak perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur berarti setiap pembangunan dilakukan secara terpadu, memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi antara lingkungan hidup yang terjaga dan infrastruktur yang terencana dengan baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa ketertiban umum selalu terjaga. Program-program keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan dan pengawasan warga, melalui upaya ini diharapkan membantu meminimalisir potensi konflik dan kriminalitas di Kabupaten Bandung.

Selain itu, pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya ketertiban umum harus terus ditingkatkan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran mereka dalam menjaga ketentraman, kita dapat membangun rasa tanggung jawab kolektif. Partisipasi aktif dari warga dalam melaporkan tindakan mencurigakan dan mendukung kebijakan keamanan akan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adalah pondasi untuk mencapai ketentraman yang diinginkan.

Pada akhirnya menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Stabilitas yang terjaga akan meningkatkan kualitas hidup, menarik investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, Kabupaten Bandung dapat menjadi tempat yang lebih baik untuk tinggal, bekerja, dan berwisata, sesuai dengan visi besar untuk menjadi daerah yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Cilengkrang.

Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas***" Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi yaitu:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak.
b. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.
c. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi.
e. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Agar Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, maka Kecamatan Cilengkrang menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada visi dan misi bupati. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Kecamatan Cilengkrang untuk mencapai Sasaran dalam RPJMD kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cilengkrang mengacu kepada ***Tujuan Pembangunan 3***: ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*** dengan ***sasaran pembangunan: Meningkatnya Kualitas Birokrasi***

yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien, Sehingga di rumuskan tujuan dan kecamatan yaitu sebagai berikut :

VISI	Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas		
MISI	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel		
TUJUAN RPJMD	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang baik		
SASARAN RPJMD	Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien		
TUJUAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indikator Laju Indek Kepuasan Masyarakat	Target Tahun 2026 0.10 %
SASARAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indikator Indek Kepuasan Masyarakat	Target Tahun 2026 sebesar 86,12 Point

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Sebagai unit pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan, keberadaan kecamatan menjadi sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan tidak hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga sebagai representasi nyata kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pentingnya pelayanan publik di kecamatan terletak pada fungsinya sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Kecamatan menjadi tempat pertama yang dituju oleh warga untuk mengurus berbagai keperluan administrasi seperti surat keterangan, izin keramaian, hingga informasi pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan akan sangat menentukan citra dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pelayanan publik yang baik harus bersifat cepat, transparan, adil, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika pelayanan publik berjalan dengan efektif dan efisien, maka kehadiran pemerintah akan dirasakan secara nyata dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kecamatan juga memiliki tanggung jawab dalam mendorong reformasi birokrasi melalui pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan membangun sistem pelayanan yang prima, kecamatan dapat menjadi motor penggerak terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Dengan demikian, memperkuat pelayanan publik di kecamatan bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari komitmen moral dan sosial untuk memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara adil dan bermartabat. Kecamatan yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas adalah cermin dari pemerintah daerah yang berpihak kepada rakyat.

Oleh karena itu Kecamatan Cilengkrang menetapkan tujuan dalam rencana kerja yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator dengan indikator Laju Indek Kepuasan Masyarakat. keberadaan IKM menjadi sangat vital. Bagi kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan pemerintah daerah, laju atau tren kenaikan IKM tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan di wilayahnya.

Pentingnya laju IKM terletak pada kemampuannya dalam menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Melalui hasil survei IKM, kecamatan dapat mengidentifikasi titik-titik kelemahan dalam proses pelayanan, seperti waktu penyelesaian, sikap petugas, kemudahan prosedur, serta keterbukaan informasi. Dengan demikian, kecamatan dapat melakukan inovasi dan perbaikan yang lebih tepat sasaran, berbasis data dan aspirasi masyarakat.

Lebih jauh, meningkatnya IKM juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program Pelayanan Administrasi di Kecamatan, serta upaya reformasi birokrasi di level lokal. IKM bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi cermin dari kepedulian, komitmen, dan profesionalitas aparat kecamatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, dan memuaskan.

Dengan terus mendorong peningkatan laju IKM, kecamatan dapat mewujudkan budaya kerja yang lebih responsif dan berorientasi pada masyarakat. Ini sekaligus memperkuat posisi kecamatan sebagai wajah pemerintah daerah dan garda terdepan dalam menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk lebih jelasnya program yang mendukung prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel
Dukungan Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten dan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program Kecamatan
PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	P13 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program Kecamatan
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Sumber Bapperida, diolah

Untuk memperjelas kerangka kerja dari Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cilengkrang pada Tahun Anggaran 2026 Berikut ini :

TABEL
TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGAIATAN KECAMATAN CILENGKRANG

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan					
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah			
1.1			Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.1.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1.1.5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
1.1.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.1.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.8			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
1.1.9			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
1.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang sesuai SAP		
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.2.3			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1.2.4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	
1.2.5			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1.3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi BMD		
1.3.1			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.2			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.3			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.3.4			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu		
1.4.1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1.4.2			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
1.4.3			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1.4.4			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.4.5			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.5			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.5.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1.5.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.5.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	
1.5.4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.5.5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1.5.6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
1.5.7			Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
1.5.8			Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
1.5.9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1.6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah		
1.6.1			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
1.6.2			Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
1.6.3			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Lainnya yang Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Disediakan	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
1.7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.7.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.7.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.7.3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1.7.4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah		
1.8.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1.8.2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.8.3			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1.8.4			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1.8.5			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
2.1			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		
2.1.1			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.1.2			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.2			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan		
2.2.1			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.3			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		
2.3.1			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
2.4			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat		
2.4.1			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	
2.4.2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Menimgkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			
3.1			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
3.1.1			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
3.1.2			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.2			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memilik Desa)		Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		
3.2.1			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
3.2.2			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
3.2.3			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
3.3			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		
3.3.1			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
3.3.2			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
3.3.3			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
3.3.4			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
3.3.5			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
3.3.6			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
3.3.7			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib			
4.1			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		
4.1.1			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.1.2			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
4.2			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
4.2.1			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatanyang ditugaskan kepala daerah			
5.1			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
5.1.1			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5.1.2			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
5.1.3			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
5.1.4			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan			
6.1			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa		
6.1.1			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
6.1.2			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
6.1.3			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
6.1.4			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
6.1.5			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
6.1.6			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
6.1.7			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6.1.8			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

3.3 Program dan kegiatan

Program dan kegiatan perangkat daerah merupakan instrumen utama dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui program dan kegiatan, perangkat daerah mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah daerah secara terarah, sistematis, dan dapat diukur hasilnya.

Setiap program disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Kegiatan dan subkegiatan merupakan bagian operasional dari program, yang dirancang untuk menghasilkan output dan outcome yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah harus berpedoman pada sistem klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan perubahannya, termasuk Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta integrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

Program dan kegiatan perangkat daerah tidak hanya bertujuan untuk mencapai target indikator kinerja, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan menjalankan program yang tepat sasaran, efisien, dan partisipatif, perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan wilayah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan program dan kegiatan di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis. Kecamatan, sebagai perangkat daerah yang menjalankan sebagian urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik, merupakan garda terdepan serta cermin wajah dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dirancang harus mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat secara nyata.

Penyusunan program dan kegiatan yang tepat dan terukur merupakan kunci untuk mencapai tujuan utama kecamatan, yaitu

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik ditandai dengan pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, efisien, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perencanaan yang matang dan berbasis data serta kebutuhan riil di lapangan.

Tanpa program dan kegiatan yang jelas serta terarah, peningkatan kualitas pelayanan publik akan sulit dicapai secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kecamatan dituntut untuk menyusun program yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah.

Adapun Program Kegiatan Kecamatan Cilengkrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung daan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, dapat kami rumuskan sebagai berikut :

TC 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 HASIL DESK TAGGING PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN CILENGKRANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN CILENGKRANG

Kode Rekening					Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
7	**01**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** **Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah**	**62 point** **48 Point**	**5,135,045,162**	**APBD**		**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** **Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah**	**64 point** **52 Point**	**4,978,773,300**
7	**01**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akip**	**81 Point**	**49,627,300**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Nilai Akip**	**82 Point**	**45,000,000**
7	01	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	14,362,000	**APBD**		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	15,000,000
7	01	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,140,400	**APBD**		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000
7	01	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,690,400	**APBD**		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000
7	01	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,140,400	**APBD**		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000
7	01	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,690,400	**APBD**		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000
7	01	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4,053,300	**APBD**		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	6,000,000
7	01	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,990,400	**APBD**		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,000,000
7	01	1	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2,280,000	**APBD**		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1,500,000

Kode Rekening					Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
7	01	1	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,280,000			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**93%**	**4,605,926,500**		**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**93%**	**4,605,270,000**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	4,596,100,000	**APBD**		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	4,596,100,000
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	2,520,000	**APBD**		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	2,000,000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	4,006,500	**APBD**		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	3,000,000
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	3,300,000	**APBD**		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	4,170,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**	**85%**	**3,300,000**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**	**85%**	**3,000,000**
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	3,300,000	**APBD**		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian PAD**	**0%**	**0**	**APBD**		**Persentase Capaian PAD**	**0%**	**0**
7	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0	**APBD**		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0
7	**01**	**01**	**2.05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu**	**88%**	**36,920,000**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu**	**88%**	**10,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	25,000,000	**APBD**		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	2,000,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	11,920,000	**APBD**		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	3,000,000

Kode Rekening					Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**88%**	**89,136,442**	APBD	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**88%**	**51,703,300**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,999,600	APBD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	34,913,800	APBD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	17,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13,153,490	APBD		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	6,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	12 paket	11,876,300	APBD		Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	12 paket	11,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11,793,252	APBD		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	3,703,300
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0	APBD		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	11,400,000	APBD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	5,000,000
7	**01**	**01**	**207**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**80%**	**36,592,000**	APBD	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**80%**	**20,000,000**
7	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	36,592,000	APBD		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	15,000,000
7	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	APBD		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5,000,000
7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	APBD		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-
7	01	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	APBD		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0

Kode Rekening					Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
7	01	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	APBD		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
7	**01**	**01**	**208**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**175,812,920**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**149,300,000**
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24,586,920	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	23,400,000
7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	151,226,000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	125,900,000
7	**01**	**01**	**209**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**	**87%**	**137,730,000**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**	**87%**	**94,500,000**
7	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit mobil 4 motor	67,740,000	APBD		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit mobil 4 motor 1 Unit Cator	69,500,000
7	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit/tahun	10,000,000	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit/tahun	5,000,000
7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	59,990,000	APBD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20,000,000
7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	unit	0	APBD		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	unit	0
					Jumlah 1			**5,135,045,162**					**4,978,773,300**
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat**	**89.00%**	**214,774,900**	**APBD**		**Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat**	**89.00%**	**228,983,200**
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**0.00%**	**0**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**0.00%**	**0**

Kode Rekening					Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 laporan	0	APBD		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 laporan	0
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan**	**96%**	**7,530,000**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan**	**96%**	**4,999,000**
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7,530,000	APBD		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4,999,000
7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**92%**	**38,610,000**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**92%**	**22,000,000**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen	38,610,000	APBD		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen	22,000,000
7	01	02	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		0	APBD		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		0
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan**	**87%**	**168,634,900**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan**	**87%**	**201,984,200**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	168,634,900	APBD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	201,984,200
7	01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84.00%**	**125,283,900**	**APBD**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84.00%**	**77,000,000**
7	01	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**97%**	**27,060,000**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**97%**	**15,000,000**

Kode Rekening					Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	-	0	APBD		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	0
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	laporan	0	APBD		Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	laporan	0
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 kegiatan	27,060,000	APBD		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 kegiatan	15,000,000
7	01	**03**	2.02		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**84%**	**46,768,900**	APBD	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**84%**	**24,000,000**
7	01	03	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga	35,553,900	APBD		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga	20,000,000
7	01	03	2.02	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	4,225,000	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	4,000,000
7	01	03	2.02	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	6,990,000	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	0
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**82%**	**51,455,000**	APBD	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**82%**	**38,000,000**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30 Keluarga	3,000,000
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	3,000,000

Kode Rekening					Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	7,800,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	3,000,000
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30 Keluarga	3,000,000
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan KKesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan KKesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	4,550,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan KKesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	3,000,000
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 Keluarga	15,540,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	3,000,000
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	4,225,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	3,000,000
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	4,225,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	3,000,000
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga	3,000,000
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	4,225,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	4,000,000
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	4,000,000

Kode Rekening					Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60 Keluarga	10,890,000	**APBD**		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	3,000,000
7	01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**78.00%**	**66,840,000**	**APBD**		**Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**78.00%**	**28,725,000**
7	01	**04**	**2.01**	**0**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**78%**	**18,840,000**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**78%**	**4,725,000**
7	01	04	**2.01**	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporam	18,840,000	**APBD**		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporam	4,725,000
7	01	**04**	**2.02**	**0**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**79%**	**48,000,000**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**79%**	**24,000,000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	48,000,000	**APBD**		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	24,000,000
7	01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**97.00%**	**154,410,000**	**APBD**		**Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**97.00%**	**48,760,000**
7	01	**05**	**2.01**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**154,410,000**	**APBD**	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**48,760,000**
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 ORANG	53,750,000	**APBD**		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 ORANG	14,760,000

Kode Rekening					Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	0	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	orang	0
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350 ORANG	43,000,000	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350 ORANG	13,000,000
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	17,580,000	APBD		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	3,000,000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	40,080,000	APBD		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	18,000,000
7	01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	**59,700,000**	APBD		**Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa**	**100%**	**95,300,000**
7	01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**59,700,000**	APBD	**Perlunya pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi hasil analisa kebutuhan**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**95,300,000**
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	17,580,000	APBD		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	10,000,000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	17,580,000	APBD		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	13,300,000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0	APBD		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	48,000,000
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	24,540,000	APBD		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	24,000,000
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0	APBD		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban embaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0

Kode Rekening					Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0 Dokumen	0	**APBD**		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	0
								621,008,800					**478,768,200**
								5,756,053,962					**5,457,541,500**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah kecamatan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Renja ini memuat program, kegiatan, subkegiatan, target capaian, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan hasil Musrenbang tingkat kecamatan.

Komponen penting dalam Renja adalah perencanaan kerja dan pendanaan. Perencanaan kerja mencakup rumusan kegiatan-kegiatan prioritas kecamatan yang berorientasi pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sementara itu, perencanaan pendanaan mencakup estimasi kebutuhan anggaran untuk setiap program dan kegiatan, yang disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kemampuan fiskal daerah.

Perencanaan pendanaan yang baik dalam Renja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kecamatan dan akan memengaruhi pengalokasian APBD. Oleh karena itu, kecermatan dalam menyusun pendanaan menjadi sangat krusial agar seluruh rencana kerja dapat direalisasikan secara optimal.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung menyusun suatu instrumen pelaksanaan teknis dalam bentuk program dan kegiatan. Sebagai salah satu instrumen, program akan mencakup satu atau beberapa kegiatan. Adapun kegiatan, sebagai turunan dari program, akan mencakup tindakan-tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk didalamnya peralatan dan teknologi sebagai input untuk menghasilkan output kegiatan yang telah ditargetkan.

Adapun pendanaan program, kegiatan, subkegiatan pada Rancangan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun Anggaran 2026 sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. Dimana secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2026 ini masih

sangat minim dibandingkan dengan Analisa kebutuhan yang diperlukan oleh Kecamatan Cilengkrang dalam pencapaian Target Kinerja yang telah tercantum dalam Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029.

Sehingga pada penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 akan diusulkan penambahan anggaran sesuai Analisa dan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta menutup kebutuhan belanja wajib mengikat dan belanja program prioritas bupati bandung serta kebutuhan belanja rutin operasional kecamatan dan belanja program, kegiatan, subkegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kecamatan. Rincian Rencana kerja dan Pendanaan sebagai berikut :

URUSAN, BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP)
KECAMATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** **Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah**	**62 point** **48 Point**	**5,135,045,162**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Akip**	**83 Point**	**49,627,300**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	14,362,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,140,400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,690,400
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,140,400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,690,400

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4,053,300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,990,400
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2,280,000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,280,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**93%**	**4,605,926,500**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	4,596,100,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	2,520,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	4,006,500
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3,300,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**	**85%**	**3,300,000**
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	3,300,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Capaian PAD**	**0%**	**0**
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu**	**88%**	**36,920,000**

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	25,000,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	11,920,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**88%**	**89,136,442**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,999,600
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	34,913,800
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13,153,490
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	12 paket	11,876,300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11,793,252
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	11,400,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**80%**	**36,592,000**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	36,592,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**175,812,920**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24,586,920
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	151,226,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**	**87%**	**137,730,000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit mobil 4 motor	67,740,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit/tahun	10,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	59,990,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	unit	0
Jumlah 1			**5,135,045,162**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat**	**89.00%**	**214,774,900**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**0.00%**	**0**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	0 laporan	0

Kecamatan	Tingkat Kecamatan		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan**	**96%**	**7,530,000**
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7,530,000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**92%**	**38,610,000**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen	38,610,000
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan**	**87%**	**168,634,900**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	168,634,900
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84.00%**	**125,283,900**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**97%**	**27,060,000**

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	0
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	laporan	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 kegiatan	27,060,000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**84%**	**46,768,900**
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga	35,553,900
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	4,225,000
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	6,990,000
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**82%**	**51,455,000**
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	0

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	7,800,000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	0
Peningkatan KKesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	4,550,000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 Keluarga	15,540,000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	4,225,000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	4,225,000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	0
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	4,225,000

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60 Keluarga	10,890,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**78.00%**	**66,840,000**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**78%**	**18,840,000**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporam	18,840,000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**79%**	**48,000,000**
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	48,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**97.00%**	**154,410,000**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**154,410,000**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	350 ORANG	53,750,000

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	orang	0
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350 ORANG	43,000,000
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	17,580,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	40,080,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa**	**100%**	**59,700,000**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**59,700,000**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	17,580,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	17,580,000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	24,540,000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	0
			621,008,800
			5,756,053,962

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 . Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar organisasi kecamatan melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Ranwal Renja Kecamatan Cilengkrang tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan,

mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Ranwal Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum maksimal.
4. Penyusunan Ranwal Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 mengacu kepada Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 yang disusun pada Januari 2024 sebagaimana amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah belum menyesuaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan sedangkan program, kegiatan dan subkegiatan bertambah, sehingga mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena belum dilaksanakannya perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
5. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN sesuai dengan analisa kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibutuhkan oleh Kecamatan Cilengkrang.
6. Rancangan Akhir Renja SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap

keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
6. Memohon penyesuaian Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 yang disusun pada Januari 2024 sebagaimana amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah termasuk menyesuaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan bertambah, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran

strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Termasuk perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan.

CAMAT CILENGKRANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CILENGKRANG

Drs. AGUS RIZAL, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196808121990101001

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILENGKRANG
Jln Pasirjati No 3, Jatiendah Cilengkrang Bandung Telp. 022 780 6363 Email :
kec_cilengkrang@bandungkab.go.id Website : kecamatancilengkrang.bandungkab.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR 800.1.11.1/ 208 /Kec

Nama : Drs AGUS RIZAL M.Si
Jabatan : Camat Cilengkrang

MEMERINTAHKAN

Kepada :
a. Nama : **Terlampir**
b. Jabatan : Terlampir

Hari,Tanggal : Kamis - Jum'at, 10 April 2025 s/d 15 Agustus 2025
Tempat : Kantor Kecamatan Cilengkrang
Untuk : Untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Ditetapkan di Cilengkrang
Pada Tanggal 9 April 2025
CAMAT CILENGKRANG

Drs AGUS RIZAL M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196808121990101001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Lampiran 1

Nomor	:	800.1.11.1/ 208 /Kec
Tanggal	:	9 April 2025
Hal	:	Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun Anggaran 2026

DAFTAR TERLAMPIR

No	Daftar Telampir
1	NANA SUHANDA SPd 197205041993031008 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Pemerintahan
2	Drs YUDI WAHYUDI 196901011989021001 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3	YAYA KURNIA S.Ip 197310021998032006 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Sosial Budaya
4	ANNISA LARASSATI S.STP, M.I.P. 199312052015072003 Penata - III/c Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5	SITI ROHMAH S.I.P., M.M. 197805052014102003 Penata - III/c Kepala Sub Bagian Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
6	RONI GANJAR NURROHMAN PERMANA S.Ip, MM 197906062009011006 Penata Tingkat I - III/d Kepala Sub Bagian Sub Bagian Program Dan Keuangan
7	YANUAR PANJI 198101052014121001 Pengatur - II/c Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Program Dan Keuangan
8	DINI ELINDA 198109082014122001 Pengatur - II/c Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Program Dan Keuangan
9	ERNA ERMAWATI SE 198101132014112001 Pengatur - II/c Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

10	ERTY MERLINA A.Md. 198505142020122002 Pengatur Tingkat I - II/d Pengolah Data Dan Informasi Seksi Pemerintahan

Verifikator

Nomor	:	800.1.11.1/ 208 /Kec
Tanggal	:	9 April 2025
Hal	:	Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun Anggaran 2026

DAFTAR VERIFIKATOR

No.	Tanggal Verifikasi	Verifikator	Status
1	2025-07-14 10:58:17	**RONI GANJAR NURROHMAN PERMANA S.Ip, MM** KEPALA SUB BAGIAN	

JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENJA

KECAMATAN CILENGKRANG TAHUN 2026

NO	URAIAN	APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				KET
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pembentukan Tim Penyusun, Agenda Kerja Penyusunan Renja																									
2	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan Renja																									
3	Penyusunan Ranwal Renja Perangkat																									
4	Verifikasi Ranwal Renja PD																									
5	Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah																									
6	Verifikasi Rancangan Renja PD																									
7	Penyusunan Ranhir Renja Perangkat																									
8	Verifikasi Ranhir Renja PD																									

9	Penetapan Renja Perangkat Daerah Oleh Kepala Daerah																								

Ditetapkan di : Cilengkrang,
Pada tanggal : 10 April 2025

CAMAT CILENGKRANG

Drs. AGUS RIZAL, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680812 199010 1 001